



## KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

### KETERANGAN PERS

**Nomor: 28/HM.00/V/2023**

### **Kriteria Calon Anggota Legislatif Sadar HAM pada Pemilu 2024**

Komnas HAM secara aktif berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara melalui Pemilu maupun Pilkada, khususnya hak untuk memilih dan dipilih serta hak-hak masyarakat kelompok rentan sejak 2018 hingga 2020. Sebagai upaya berkelanjutan, Komnas HAM konsisten untuk berperan aktif dalam mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi pemenuhan hak konstitusional warga negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Sejalan dengan tahapan pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan berlangsung hingga 14 Mei mendatang. Komnas HAM memandang penting untuk menyampaikan himbauan kepada partai-partai politik agar mempertimbangkan sejumlah kriteria SADAR HAM dalam merekrut, menyaring, dan mengajukan para calon yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024. Partai Politik sebagai stakeholder utama dalam proses pencalonan Anggota Legislatif dalam Pemilu, memiliki peran sangat penting untuk menentukan Caleg dengan kriteria seperti apa yang akan diajukan. Oleh karena itu, Partai Politik perlu mempertimbangkan kriteria-kriteria calon terkait dengan HAM, selain mempertimbangkan kualitas, profesionalitas, dan loyalitas mereka. Dengan demikian maka partai politik akan memberi kontribusi besar dalam mendukung terwujudnya kontestasi politik yang RAMAH HAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Adapun Kriteria Calon Anggota Legislatif Sadar Hak Asasi Manusia tersebut, yaitu:

**Pertama**, memiliki pandangan yang berorientasi pada NKRI, kebhinekaan, toleransi, dan anti-diskriminasi.

**Kedua**, memiliki visi dan misi terkait pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM, termasuk kepada kelompok rentan.

**Ketiga**, memiliki program kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

**Keempat**, berkomitmen dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi.

**Kelima**, tidak memiliki rekam jejak pelanggaran HAM, di antaranya KDRT, kekerasan seksual, intoleransi, kejahatan yang terafiliasi dengan masalah lingkungan dan sumber daya alam serta korupsi.

Jakarta, 10 Mei 2023

**Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara  
pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024**

**Ketua Tim,**

**Pramono Ubaid Tanthowi**